



## PERAN PENGELOHAN DATA ELEKTRONIK DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KOTA MEDAN

Muhammad Ridho<sup>1</sup>, Muhammad Irwan Padli Nasution<sup>2</sup>,  
<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
<sup>1</sup>[ridhomm17@gmail.com](mailto:ridhomm17@gmail.com), <sup>2</sup>[irwannst@uinsu.ac.id](mailto:irwannst@uinsu.ac.id)

### Abstract

*This research discusses the important role of electronic data management in supporting the implementation of e-Government in Medan city. Along with the advancement of information technology. The city government has created 25 digital service applications, such as licensing systems, e-planning, e-budgeting, and public complaint services. Data integration across agencies improves accountability, efficiency and transparency of services and makes public information more accessible to citizens and policymakers. However, a number of obstacles still hinder the adoption of this system, including the low level of digital literacy of the community, inadequate technological infrastructure, and poor two-way communication between the community and the government. This research uses the literature review method by collecting various relevant sources. The results of the study show that to improve the success of e-Government, it is necessary to increase digital literacy, improve infrastructure, strong data security systems and community involvement in digital services.*

**Keywords:** e-Government, Electronic data management, Medan city

### Abstrak

Penelitian ini membahas peran pentingnya pengelolaan data elektronik dalam mendukung penerapan e-Government di kota Medan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah kota telah menciptakan 25 aplikasi layanan digital, seperti sistem perizinan, e-planning, e-budgeting, hingga layanan pengaduan masyarakat. Integrasi data di seluruh instansi meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan layanan serta membuat informasi publik lebih mudah diakses oleh warga dan pembuat kebijakan. Namun demikian, sejumlah kendala masih menghadang adopsi sistem ini, termasuk rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan komunikasi dua arah yang kurang baik antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan e-Government perlu dilakukan peningkatan literasi digital, perbaikan

### Article History

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 235  
Prefix DOI :  
[10.8734/Koehesi.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/Koehesi.v1i2.365)  
Copyright : Author  
Publish by : Koehesi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



<p>infrastruktur, sistem keamanan data yang kuat serta keterlibatan masyarakat dalam pelayanan digital. <b>Kata Kunci:</b> : <i>e-Goverment, Pengelolaan data elektronik, kota medan</i></p>	
--	--

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat telah memfasilitasi banyak usaha manusia, termasuk di sektor publik. Penggunaan e-government telah meningkatkan efisiensi layanan publik dan tata kelola administrasi. Modernisasi sistem pemerintahan, termasuk e-government, telah mengubah cara masyarakat dilayani oleh pemerintah pusat dan daerah.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Pemerintah Kota Medan yang mengedepankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya melalui data yang terstandarisasi dan terintegrasi, sejalan dengan pentingnya pengelolaan data elektronik di Kota Medan sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Penerapan teknologi informasi dalam e-Government bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui pengelolaan data yang efektif, berbagai aplikasi dan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diintegrasikan, sehingga informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan pengambil kebijakan.

Pengelolaan data elektronik yang efektif juga mendorong efisiensi dalam administrasi dan layanan publik, termasuk memulai digitalisasi layanan kependudukan, perizinan, dan ketenagakerjaan di Medan. Pemerintah dapat melakukan pemantauan, penilaian, dan pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan akurat dengan data yang terkini dan benar. Selain itu, dengan membuat informasi mudah diakses, data yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan keterlibatan publik, yang pada akhirnya meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hutajulu (2020)

Sebagai hasilnya, Pengelolaan data elektronik merupakan komponen teknis dan strategis dalam penerapan e-Government di Kota Medan. Ini adalah titik awal yang penting untuk menciptakan pemerintahan kontemporer dan responsif yang memprioritaskan layanan publik yang berkualitas tinggi.

## 2. KAJIAN TEORITIS

*Electronic government* atau biasa disebut dengan *e-government* memiliki banyak deskripsi dari berbagai kalangan. The World Bank Group mendefinisikan *e-government* sebagai: “*the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*” (Penggunaan teknologi informasi oleh agensi pemerintah (seperti penggunaan WAN, internet, dan computer mobile) yang mana memiliki kemampuan untuk merubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan cabang lain dari pemerintah). (Wicaksono, 2019)

Salah satu titik balik penting dalam sejarah Indonesia adalah reformasi 1998, yang secara efektif mendorong penyesuaian pada struktur pemerintahan negara. Gerakan reformasi menuntut kemajuan di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Munculnya reformasi birokrasi, yang terkait erat dengan kondisi birokrasi sebelumnya yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), merupakan salah satu dampak utama reformasi.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap manajemen pemerintahan pada saat itu mendorong dibuatnya peraturan baru untuk mengembalikan fungsi pemerintahan yang ideal. Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi otonomi daerah, fokus pada kesejahteraan



masyarakat tetap menjadi landasan untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab pemerintah.

Pelayanan publik di Kota Medan mulai dibangun dengan pendekatan digital. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan membina hubungan yang dinamis antara masyarakat dan penyedia layanan publik, penggunaan teknologi ini juga mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kota. Pelayanan publik yang lebih baik dalam hal infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan inovasi diantisipasi sebagai hasil dari kemampuan masyarakat untuk secara langsung melaporkan atau mengadakan masalah pelayanan.

Sebanyak 21 kecamatan yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Medan telah menerapkan reformasi birokrasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganugerahi mereka penghargaan pada tahun 2018 atas inovasi layanan publik berbasis e-Government. Penerapan sistem e-Government, termasuk layanan perizinan digital, sistem pengaduan, e-planning, e-budgeting, e-Sapras, dan lainnya, dianggap efektif oleh Pemerintah Kota Medan.

Baru tiga tahun berlalu sejak implementasi layanan publik digital ini. Peraturan Walikota Medan No. 28/2018 tentang Kota Cerdas, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Walikota No. 39/2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menguraikan tujuan dan visi pengembangan e-Government. Kota Medan menerima penghargaan Smart City 2021 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk kategori Smart Governance sebagai hasil dari peraturan ini dan dukungan pemerintah yang kuat. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas pencapaian Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan dan melaksanakan inisiatif Kota Cerdas serta efektivitasnya dalam mengelola administrasi kependudukan.. (Ivanna et al., 2023)

Di dalam konsep *e-Government*, dikenal pula 3 jenis klasifikasi, plus satu tambahan klasifikasi berdasarkan realitas kehidupan modern), di antaranya adalah:

- 1) *Government to Citizens* (G-to-C). Tipe G-to-C merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, di mana pemerintah menggunakan Teknologi Informasi untuk meningkatkan keterlibatan publik dan kualitas layanan.
- 2) *Government to Business* (G-to-B). Tipe G-to-B merupakan aplikasi *e-government* yang digunakan untuk membantu bisnis swasta berjalan dengan lancar dan meningkatkan interaksi yang produktif dan sukses antara sektor publik dan swasta.
- 3) *Government to Governments* (G-to-G). Merupakan aplikasi *e-government* yang digunakan untuk memudahkan instansi pemerintah untuk bekerja sama dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik, perdagangan, administrasi, serta elemen sosial dan budaya.
- 4) *Government to Employees* (G-to-E). Merupakan aplikasi *e-government* yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mesin negara yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum. (Ndou, 2004)

Dengan Salah satu manfaat utama *e-government* adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yang merupakan salah satu dari sekian banyak keuntungannya. Sementara efisiensi mengacu pada menyelesaikan sesuatu dengan cara terbaik, efektivitas mengacu pada penyelesaian proyek yang tepat sasaran. Penggunaan *e-government* dalam layanan publik didasarkan pada sejumlah elemen kunci untuk mencapai dua tujuan ini, termasuk:

- 1) Fungsi: Masyarakat dapat menerima layanan dan informasi pemerintah melalui *e-government*.
- 2) Orientasi: *E-government* bertujuan untuk meningkatkan integrasi data internal pemerintah, kepuasan pengguna layanan, pendapatan asli daerah (PAD), dan pembangunan.
- 3) Tahapan Komunikasi, yaitu seberapa jauh tahapan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan *e-government*. Tahapan tersebut terbagi atas:



- a) Informasi (komunikasi satu arah): Situs web atau portal resmi digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan informasi.
  - b) Interaksi (komunikasi dua arah): Masyarakat dan pemerintah dapat berkomunikasi secara online secara dua arah.
  - c) Transaksi: Layanan yang terkait dengan transaksi online, seperti tanda tangan dokumen elektronik atau pembayaran.
  - d) Transformasi (interoperabilitas): Transformasi sistem didorong oleh integrasi menyeluruh di tingkat proses, data, dan teknologi.. (Resta & Reni, 2013)
- 4) *Information Processing/Back Office*, yaitu yaitu administrasi aliran informasi, dimulai dengan entri data melalui portal dan mencakup pemutakhiran data secara online dan offline.
  - 5) *Portalq/Front Office*, yaitu media berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Contohnya adalah internet, pusat informasi (seperti call center dan kios informasi), ATM (untuk transaksi), WAP (melalui telepon genggam), dan lain sebagainya.
  - 6) Aksesibilitas/Integrasi Jaringan, hal ini mengacu pada ketersediaan jaringan informasi dan komunikasi online internal dan eksternal.

*E-government* menawarkan beberapa unggulan utama ICT yang dapat mendorong terwujudnya *good governance* di negara-negara berkembang melalui 3 tahap perubahan mendasar:

- 1) *Automation*: yakni pergeseran dari pemrosesan informasi secara manual ke teknologi digital;
- 2) *Informatisation*: yakni mempercepat proses pengolahan informasi, misalnya dalam pengambilan keputusan dan implementasi keputusan;
- 3) *Transformation*: yakni penciptaan metode-metode pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Dari Dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, ketiga tahap tersebut menawarkan beberapa manfaat, seperti:

- a. Efisiensi: Pemerintah dapat mempercepat prosedur kerja, menjangkau khalayak yang lebih luas, dan menyediakan layanan dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini dapat berupa mendapatkan hasil yang sama dengan lebih cepat, mendapatkan hasil yang lebih baik dengan biaya tertentu, atau mendapatkan hasil yang sama dengan biaya yang lebih rendah.
- b. Efektivitas: Pemerintah dapat beroperasi dengan cara yang lebih kreatif dan lebih unggul. Hal ini melibatkan penawaran berbagai layanan alternatif yang memenuhi persyaratan dan keadaan masyarakat serta menghasilkan layanan yang lebih berkualitas tanpa menambah waktu atau biaya.. (Pramono, 2022)

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan literatur review. Metode ini dipilih karena pendekatan ini mengumpulkan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan memeriksa informasi terkini. Jurnal ilmiah, artikel dan sumber-sumber lain digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan. Menggunakan protokol pencarian data Google Scholar dengan istilah “e-Government,” “manajemen data elektronik,” dan “Kota Medan,”



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem layanan e-government Kota Medan mencakup 25 aplikasi, termasuk layanan perizinan, pendaftaran akta kelahiran, perpustakaan, webmail, dan sistem informasi geografis. Selain itu, terdapat juga sistem pengadaan elektronik, perhitungan dan retribusi IMB, pengendalian lalu lintas, layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, e-planning, sistem kepegawaian, manajemen kearsipan, ketahanan pangan, e-budgeting, katalog daerah, administrasi, persuratan, agenda, arsip, informasi sarana olahraga, dokumentasi hukum, serta aplikasi untuk laporan, pengaduan, dan layanan Metro.

Ke-25 aplikasi ini telah dinilai berdasarkan beberapa aspek, yaitu transparansi, pelayanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, dan pembaruan. Hasil evaluasi sebagai berikut:

Item Penilaian	Evaluasi
Transparansi	Rencana program pemerintah dan laporan pengelolaan anggaran telah tersedia untuk umum di situs resmi pemerintah Kota Medan sejak tahun 2014.
Pelayanan	Dari 25 aplikasi, 9 layanan-seperti perizinan, pendaftaran akta kelahiran, perpustakaan, layanan laporan, katalog daerah, sistem lalu lintas, SMS center, layanan pengaduan, dan informasi keluarga berencana-dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum. Namun demikian, masyarakat tidak memiliki akses ke empat layanan ini: informasi keluarga berencana, pusat SMS, sistem lalu lintas, dan bagian pengaduan.
Update	Karena rutin di update situs web pemerintahan kota medan jadi cukup baik dalam memberikan informasi.
Efisiensi	Penggunaan aplikasi ini secara efisien menguntungkan masyarakat umum, pemilik bisnis, dan lembaga pemerintah dengan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.
Aspirasi	Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui layanan pengaduan selain menggunakan aplikasi Lapor. Namun, karena kekurangan sistem, penggunaan layanan ini agak sulit.
Tampilan	Tampilan situs web sudah baik dari sudut pandang peneliti karena menawarkan menu yang besar, live chat, media sosial pemerintah, dan fitur pencarian.
Ekonomi	Bisnis, sektor publik, dan masyarakat umum telah menggunakan informasi yang tersedia secara bebas di situs web tentang prospek investasi untuk membuat keputusan investasi.

##### 4.1 Hambatan-Hambatan Penarapan E-Government

Hanya sedikit orang yang tahu cara memanfaatkan layanan e-government karena Pemerintah Kota Medan belum mensosialisasikannya secara memadai, berbeda dengan 2,46 juta penduduk kota ini. Dari jumlah tersebut, mungkin hanya sekitar 5.000 atau 5.000 orang yang tahu cara memanfaatkannya. Layanan yang awalnya berfungsi sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan ini tidak berjalan sesuai rencana karena komunikasi antara Pemerintah Kota Medan dan masyarakat masih bersifat satu arah. Sebagaimana dilaporkan oleh Go Sumut.com (2021):

“Layanan e-government yang dikembangkan oleh Pemko Medan memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi satu arah. Ini adalah contoh keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tentang jalan yang rusak di Jalan Thamrin Ujung atau Simpang Jalan Sutrisno Kota



Medan, serta keluhan lainnya tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Thamrin Simpang Jalan Sei Kera. Namun, instansi terkait dan kepala lingkungan setempat belum menanggapi keluhan tersebut.”

Kesalahan yang terjadi dalam beberapa hari adalah masalah lain dalam e-government. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan memberikan kesan bahwa Pemerintah Kota Medan malu karena penerapan e-government belum memberikan hasil yang positif.. seperti yang dinyatakan oleh Akses.com (2020):

“Kesalahan sering terjadi saat menggunakan layanan e-government, termasuk dalam membuat E-KTP. Akibatnya, warga Medan kesulitan mengakses layanan pembangunan dan administrasi di Kota Medan. Karena tidak berfungsinya aplikasi pengaduan masyarakat, diyakini bahwa pemerintah Kota Medan merasa malu karena adopsi eGovernment lebih banyak memberikan dampak buruk daripada manfaat, terutama dalam hal penyelesaian masalah infrastruktur..

#### 4.2 Solusi Mengatasi Hambatan-Hambatan Penerapan E-Goverment

Hambatan-hambatan penerapan e-government di Kota Medan meliputi beberapa faktor utama sebagai berikut:

- **Literasi digital masyarakat yang rendah:** Mayoritas warga Kota Medan masih kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital, yang menyulitkan mereka untuk memanfaatkan layanan e-government secara maksimal. (Ivanna et al., 2023)

**Solusi :** Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknologi informasi masyarakat, inisiatif pelatihan dan program pendidikan harus diimplementasikan untuk memperkuat program literasi digital.

- **Perubahan budaya organisasi yang lambat:** Lingkungan kerja di pemerintahan daerah belum sepenuhnya mendukung penerapan e-government secara menyeluruh dan konsisten.

**Solusi :** Hingga e-government diimplementasikan, pemerintah harus mengadopsi pendekatan partisipatif dengan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Selain itu, para pemimpin perusahaan memiliki peran penting dalam mempromosikan budaya yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan.

- **Masalah teknis dan infrastruktur:** Infrastruktur layanan e-government masih belum memadai, dan sering terjadi kesalahan teknis yang menyulitkan layanan untuk berjalan dengan lancar, termasuk aplikasi pengaduan yang tidak berfungsi dengan baik.

**Solusi :** Dengan meningkatkan kualitas jaringan internet dan kapasitas server yang memungkinkan layanan digital, masalah teknis dan infrastruktur dapat diatasi. Untuk memastikan bahwa aplikasi e-government selalu berfungsi dengan baik dan tanpa gangguan, pemerintah harus melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara rutin. Untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dengan andal dan cepat, sangat penting untuk berinvestasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

- **Partisipasi masyarakat yang rendah:** Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih bersifat satu arah, sehingga pengaduan dan partisipasi masyarakat dalam layanan e-government belum optimal.

**Solusi :** Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang rendah, pemerintah perlu membuka komunikasi dua arah yang lebih intensif dengan warga. Pemerintah harus menyediakan forum diskusi, survei online, serta layanan pengaduan yang responsif untuk menampung masukan dan keluhan masyarakat. Memberikan penghargaan atau insentif kepada warga yang aktif berpartisipasi juga dapat memotivasi masyarakat agar lebih terlibat dalam penggunaan layanan e-government. (Pratama et al., 2021)



- **Masalah keamanan data:** Ancaman terhadap keamanan data menjadi salah satu hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan e-government.

**Solusi :** Langkah-langkah keamanan yang kuat, termasuk firewall, enkripsi data, dan protokol keamanan terbaru, harus diterapkan untuk menangani tantangan keamanan data. Untuk memastikan tidak ada kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, pemerintah juga harus secara teratur melakukan penilaian keamanan. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, konsumen dan staf harus diedukasi mengenai pentingnya melindungi keamanan data dan membuat kata sandi yang kuat. (Wahyuzan et al., 2023)

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan pengelolaan data secara elektronik memiliki peranan strategis dalam mendukung penerapan e-government di Kota Medan. Integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memungkinkan informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pengambil keputusan. Pemerintah Kota Medan telah mengembangkan 25 aplikasi layanan publik digital seperti sistem perizinan, e-planning, dan e-budgeting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pelayanan publik. Upaya tersebut berhasil membawa Kota Medan meraih penghargaan Smart City 2021 dalam kategori Smart Governance, sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun pemerintahan yang modern dan responsif.

Meski begitu, penerapan e-government di Medan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, terbatasnya infrastruktur teknologi, dan komunikasi satu arah antara pemerintah dan warga. Minimnya sosialisasi membuat layanan digital belum dimanfaatkan secara maksimal, ditambah lagi dengan berbagai kendala teknis yang mengganggu. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pelatihan literasi digital, memperbaiki infrastruktur teknologi, meningkatkan sistem keamanan data, dan membuka ruang komunikasi dua arah agar masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam layanan publik digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ivanna, J., Subhilhar, H., & Kusmanto, H. (2023). *Implementation of E-Government Based Public Services in Medan City Government*.
- Ndou, V. (2004). E-government for developing countries: Opportunities and challenges. *Electron. J. Inf. Syst. Dev. Ctries.*, 18(1), 1-24.
- Pramono, S. E. (2022). Kajian kesiapan (e-readiness) kecamatan dalam penerapan e-government kota semarang. *Jurnal Riptek*, 15(2), 8-18.
- Pratama, A., Malikhah, I., Indrawan, M. I., Andika, R., & Rusiadi, R. (2021). Identifikasi Strategi Keberhasilan Layanan E-Goverment di Kota Medan. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).
- Resta, A., & Reni, W. (2013). Peran Bagian Pengolahan Data Elektronik dalam Penyelenggaraan E-Government (Studi Pendayagunaan Website Resmi Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 2(4), 126-135.
- Wahyuzan, A. P., Purba, D. E., Azzahra, M. R., & Nasirwan, N. (2023). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern: Kajian Literatur di Kota Medan. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 5(2).
- Wicaksono, F. (2019). Anti Klimaks Implementasi E-Government: Analisis Partisipasi Masyarakat Petani Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).



- Wujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Pemprov Sumut Integrasikan Data dan Aplikasi OPD. Retrieved from <https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/wujudkan-sistem-pemerintah-berbasis-elektronik-pemprov-sumut-integrasikan-data-dan-aplikasi-opd>
- Kota Medan. (2025). Retrieved from [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan)
- 01, I. H. (2024). Sejarah Reformasi 1998, Tujuan dan Dampaknya. Retrieved from <https://fahum.umsu.ac.id/info/sejarah-reformasi-1998-tujuan-dan-dampaknya/>
- Medan, P. K. (2023). BERITA: Dinas Kominfo Medan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran SPBE. Retrieved from [https://portal.medan.go.id/berita/dinas-kominfo-medan-sinkronisasi-pengelolaan-rencana-induk-dan-anggaran-spbe\\_\\_read3924.html](https://portal.medan.go.id/berita/dinas-kominfo-medan-sinkronisasi-pengelolaan-rencana-induk-dan-anggaran-spbe__read3924.html)
- Diskominfo Sumut: Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Rangka Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government di Daerah Provinsi Sumatera Utara. (2021). Retrieved from <https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/kegiatan/diskominfo-sumut-sosialisasi-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-rangka-penatalaksanaan-dan-pengawasan-egovernment-di-daerah-provinsi-sumatera-utara->